



TINGGAL TUNGGU SURAT RESMI KPK Pemkot Siap Tangani Proyek Soepomo Cs

YOGYA (KR) - Terkatung-katungnya kepastian proyek saluran air di Jalan Babaran dan Celeban akibat proses penanganan dugaan suap di KPK, dikeluhkan banyak pihak termasuk pemerintah. Pemkot Yogya pun siap menangani proyek Soepomo Cs tersebut manakala sudah ada surat resmi dari KPK maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Saya yakin teman-teman akademisi dan masyarakat ingin proyek itu segera diselesaikan karena dampaknya signifikan. Kami pun juga berharap demikian karena khusus di Jalan Babaran, jalanan yang dikeruk mencapai dua pertiganya dan tinggal menyisakan sepertiga saja," tandas Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, Kamis (19/9).

Total ada tiga lokasi yang menjadi target proyek saluran air Soepomo

Cs, yakni Jalan Soepomo, Jalan Babaran dan Celeban. Namun hingga kasus yang ditangani KPK bergulir, Jalan Soepomo sama sekali belum disentuh pekerjaan. Kondisi paling mengkhawatirkan terjadi di Jalan Babaran lantaran sudah ada tiga galian berukuran besar dan dibiarkan menganga.

Heroe menambahkan, untuk menangani proyek tersebut Pemkot Yogya membutuhkan landasan. Landasan tersebut baik dari KPK maupun LKPP. Hal ini lantaran sejumlah upaya komunikasi sudah dilakukan tim Pemkot Yogya. Dalam proses hukum, barang bukti tidak boleh diubah. "Apakah itu sudah cukup dijadikan barang bukti atau belum. Itu yang kami butuhkan dari KPK atau LKPP. Hasil terakhir konsultasi kami, KPK meminta untuk menunggu surat resmi yang akan dilayangkan ke Pemkot," imbuhnya.

Menurutnya, tim dari KPK memahami kondisi faktual dampak berhentinya aktivitas pembangunan drainase Soepomo Cs. Pasalnya selama konsultasi, tim Pemkot Yogya menyampaikan semua keresahan warga yang menjadi dampak. Dokumentasi pekerjaan yang terhenti juga turut diperlihatkan. Harapannya, surat resmi atas kepastian proyek Soepomo Cs dapat segera diserahkan.

Setidaknya ada tiga opsi untuk menangani proyek tersebut, yakni menghentikan, melanjutkan, dan meneruskan dengan pihak ketiga yang lain. "Jika ranti opsinya menghentikan, akan kita urug agar warga tidak terganggu. Apalagi kalau saat musim hujan kondisinya masih seperti ini, ada potensi meluasnya kerusakan jalan dan menambah beban warga di sana. Kita tidak ingin itu terjadi," tandas Heroe. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005